

Biaya Sertifikat Siswa Tuai Protes

▶ **Orangtua Bayar Rp 250 Ribu**

▶ **Perwako Sebut Gratis**

Kami Tidak Memberatkan

BATAM, TRIBUN - Siswa di Batam kabarnya harus membayar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu untuk mendapatkan sertifikat lulus membaca Alquran. Sertifikat itu hanya diperuntukkan bagi siswa yang beragama Islam.

Padahal berdasar Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 46 tahun 2013 pada Pasal 11 disebutkan pelaksanaan ujian akhir dan ujian praktik serta pemberian sertifikat tidak dipungut biaya.

Orangtua atau wali siswa, mau tak mau harus memba-

yar karena sertifikat itu menjadi syarat bagi siswa baru di SMP dan SMA. Dasarnya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 beserta turunannya yakni Perwako Nomor 46 Tahun

● ke halaman 7

WIDYA, salah seorang wali siswa SMPN di Batam mengatakan saat anaknya melanjutkan ke sekolah itu, sertifikat lulus membaca Alquran ditanyakan oleh pihak sekolah.

"Sertifikat itu diminta sebagai persyaratan tambahan di saat anak saya masuk di salah satu SMPN. Ketika saya tanya, disebutkan sertifikatnya tidak ditentukan harus dari mana. Ketika saya kasih sertifikat anak saya yang saat mengaji di Sekolah Dasar (SD) juga diterima oleh pihak sekolah," katanya, Sabtu (14/4).

Sementara itu, Wakil Kepala SMPN 3 Batam Sri Rahayu mengatakan persyaratan sertifikat itu hanya ditujukan untuk calon siswa yang beragama Islam.

"Gunanya sertifikat itu, hanya sebagai syarat tambahan dan melihat sejauh mana

● ke halaman 7

Jangan Dimintai Uang

SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihalo-ho mengatakan, persyaratan sertifikat lulus membaca Alquran bagi siswa muslim, diatur Perda Nomor 3 Tahun 2010 dan Perwako Batam Nomor 46 Tahun 2013 sehingga sah dilaksanakan.

Permasalahannya, seba-

gian orangtua siswa merasa keberatan dengan adanya pembayaran untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Di sisi lain, sertifikat itu menjadi syarat tambahan bagi siswa yang hendak masuk SMP atau SMA.

● ke halaman 7

PERWAKO Batam nomor 46 tahun 2013 pada Pasal 11 disebutkan pelaksanaan ujian akhir dan ujian praktik serta pemberian sertifikat tidak dipungut biaya.

Biaya Sertifikat

2013.

Awalnya siswa membayar sekitar Rp 50 ribu. Namun tahun demi tahun biayanya terus meningkat.

Untuk 2018 ini sejumlah orangtua siswa mengaku harus menebus sertifikat itu antara Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu.

"Kita senang saja anak belajar agama, tetapi biaya pelaksanaan ujian pengambilan sertifikatnya itu berat, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini," kata Ny M, seorang orangtua siswa di Sagulung, Minggu (15/4).

Untuk wilayah Sagulung biaya yang harus dibayar untuk pelaksanaan ujian dan pengambilan sertifikat sekira Rp 185 ribu dan biaya wisuda Rp 32 ribu.

"Ya kalau keseluruhan kurang lebih Rp 200 ribu," katanya.

Orangtua siswa lain, Ny Is juga mendukung kebijakan itu. Namun, dia berharap ada kebijakan soal biaya yang harus dibayar. Terutama bagi orangtua siswa yang benar-benar tidak mampu.

"Ya maksud kita jangan sampai hanya karena tidak

ada uang untuk membayar sertifikat itu, anak tidak masuk sekolah. Tolong ada kebijakan, apalagi dalam kondisi ekonomi seperti saat ini," katanya.

Sementara seorang lulusan SMP, Anwar mengungkapkan, sebenarnya sertifikat itu tidak harus dari sekolah. Bisa dari lembaga lain di luar sekolah seperti Taman Pendidikan Alquran (TPA).

Akan tetapi karena di sekolah juga ada kegiatan itu, maka siswa mengikutinya. "Cuma karena di sekolah tiap tahunnya diadakan kegiatan untuk mendapatkan sertifikat itu maka saya dan teman-teman ikut yang ada di sekolah," katanya.

Padahal, lanjut Anwar, sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan, lebih mahal di sekolah. "Kalau tidak salah, di sekolah bisa sampai Rp 200 ribuan saat itu. Sekarang tidak tahu berapa dan masih ada tidaknya," ucap dia.

Banyak diprotes

Saat dihubungi, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Muslim Bidin meng-

akui sering mendapatkan protes dari orangtua siswa mengenai besaran biaya sertifikat. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena sertifikasi lulus Alquran sekarang ditangani Kemenag.

Dia membenarkan kabar biaya sertifikat itu kurang lebih Rp 250 ribu per siswa.

"Kalau biayanya yang saya ketahui sekitar Rp 250 ribu, itu pun terkadang saya dengar ada yang sampai Rp 300 ribu. Bagi sebagian orangtua siswa, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini dinilai memberatkan," ucap dia.

Menurut Muslim, aturan sertifikat itu sebagai syarat tambahan bagi calon siswa SMP dan SMA adalah Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kota Batam.

Semula, Disdik Batam yang mengeluarkan sertifikat itu melalui sekolah. Siswa tidak dipungut biaya alias gratis.

Kini, kewenangan itu beralih ke Kemenag melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Alquran (BMG-TPQ) yang ada di sekolah.

"Sekitar tiga tahun bela-

kangan ini Kemenag yang memegang dan mengeluarkan sertifikat tersebut," ujarnya.

Muslim menambahkan, untuk pengeluaran sertifikat itu, biasanya siswa belajar dan mengikuti ujian Munaqosah di Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di setiap sekolah yang sudah ada BBMG-TPQ.

Dia mengaku masih ada orangtua siswa yang mengajukan protes terkait biaya sertifikat itu ke Disdik.

"Masalah ini sudah lama diprotes tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi kewenangan Kemenag," ucap Muslim.

Dia berharap ada kebijakan agar masalah ini bisa segera terselesaikan secara baik.

Muslim mengaku bisa memahami protes orangtua siswa, tetapi hal tersebut merupakan kewenangan Kemenag.

Tribun sudah berusaha mengonfirmasi masalah ini ke Kepala Kantor Kemenag Batam H Erizal Abdullah, namun belum ada balasan.

(rus/wie/ian/als)

Herman

Kesal Sampah Berserak

- ▶ Warga Buang di Jalan Diponegoro
- ▶ Perintahkan Satpol dan DLH Patroli

BATAM, TRIBUN - Berbagai macam jenis sampah berserakan dan menumpuk di sepanjang lahan kosong disamping jalur kanan jalan Diponegoro. Sekupang yang belum diaspal dan belum dipergunakan hingga saat ini.

Dari hasil pantauan Tribun di lokasi, tumpukan sampah yang terlihat di sepanjang tepi jalur kanan jalan Diponegoro. Sekupang yang menumpuk adalah sampah hasil reruntuhan dari sisa-sisa bangunan.

Adapun sisa-sisa bangunan itu, seperti triplek yang sudah rusak, balok bangunan, pecahan kaca bangunan, hingga keramik dan kloset yang sudah rusak dibuang di sana.

Selain itu, sampah-sampah rumah tangga juga terlihat di sana, seperti plastik makanan dan kertas kardus serta sampah jenis lainnya juga terlihat berserakan di lokasi, sehingga sangat terlihat menumpuk disamping jalan dan ruas jalan tersebut.

"Mengetahui sampah yang

menumpuk itu sudah lama saya lihat banyak orang buang sampah di sana. Baik itu ada yang menggunakan mobil dan sepeda motor," kata Rahmat salah satu warga, Minggu (15/4).

Dia menyampaikan, sangat menyayangkan ulah oknum yang tidak mempedulikan kebersihan hingga tega membuang sampah sembarangan disana. Padahal itukan jalan yang mau dibangun dan tidak boleh juga membuang sampah disana.

"Sangat miris dan tidak terpuji. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan dinas terkait," katanya.

Dia menyampaikan, oknum yang sering membuang sampah biasanya membuang sampah saat malam hari, sehingga orang tidak dapat melihat aktivitasnya ketika membuang sampah di sana.

"Kalau biasanya sih mereka pasti membuang sampah pada malam hari, agar tidak ada orang yang mengetahuinya," jelasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah Togar salah satu

pekerja tempel ban di jalan Diponegoro. Sekupang menyampaikan, aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut sudah sering dilihatnya.

Bahkan tanpa berpikir panjang oknum yang tidak bertanggung jawab itu, nekat membuang sampah hasil pecahan kaca bangunan.

"Kalau yang saya lihat kebanyakan yang menggunakan mobil membuang sampah di sana," katanya.

Dia juga menilai mengapa oknum tersebut membuang sampah di sana, sebab lahan jalur kanan jalan Diponegoro yang belum diaspal dan dipergunakan itu, sangat jarang diperhatikan warga dan pengendara yang melintas, sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab itu, nekat buang sampah.

"Jalan jalur sebelah kanan itukan sudah lama tidak diperhatikan dan lokasinya pun cukup tertutup dan luas. Makanya mereka buang sampah di sana," jelasnya.

Mendengar tumpukan sampah menggunung di Jalan Diponegoro, Kadis Lingkungan Hidup Herman Rozie langsung meninjau ke lokasi.

"Hari ini juga akan kita cek kondisi tumpukan sampah itu ke lokasi dan akan kita bersihkan segera Senin besok," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozi, Minggu (15/4).

Dia menyampaikan, tumpukan sampah di lokasi tersebut sebelumnya sudah diketahui oleh petugas kebersihan dan sudah dibersihkan. Namun saat ini sampah-sampah itu kembali lagi dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ke lokasi tersebut. (als)



TRIBUN/IST

TINJAU SAMPAH- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie meninjau tempat penumpukan sampah di jalan Diponegoro Sekupang, Minggu (15/4). Herman minta Satpol dan petugas DLH patroli malam di lokasi tersebut.

Anak-anak Meriah Kartini Day

► Ikuti Lomba Mewarnai di Bengkong Sadai

BATAM, TRIBUN - Warga RW 20 Cipta Permata Kelurahan Sadai menggelar kegiatan Kartini Day. Kegiatan ini diiniasi oleh ibu-ibu PKK. Berlokasi di Posyandu mawar 20, terlihat para ibu-ibu beserta anaknya ramai sekali mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Pada kegiatan ini aneka lomba pun ada, dari lomba mewarnai, balita sehat, serta

baby dance.

Saat ini para adik-adik dari umur 1 bulan sampai umur 7 tahun menjadi peserta balita sehat, dan lomba mewarnai.

Pantauan *Tribun*, para orangtua mendampingi anak-anak imut ini sangat serius mewarnai buku gambarnya.

Ibu Ayu, menyebutkan memanfaatkan waktu libur

begini sangat bermanfaat melakukan kegiatan yang diselenggarakan.

"Soalnya anak-anak bisa belajar sambil bermain. Terus juga mengasah kemampuan keterampilannya," katanya, Minggu (15/4).

Selain itu dikatakannya, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi para orangtua dan warga di wilayah RW 20.

Rangkain kegiatan Kartini Day yang diadakan Ibu-ibu PKK RW 20 diantaranya Baby Dance membuat para emak-emaknya ikutan heboh.

Sebab, adik-adik imut ini yang menjadi peserta Baby Dance tampak malu-malu. Sehingga para orang tuanya memberikan arahan untuk berjoget dan bergoyang.

Dengan alunan musik Baby Shake adik-adik masih

berumur dibawah 5 tahun ini, berjoget sendiri. Ada yang menikmati berjoget, ada juga yang hanya memeluk orang tuanya.

Kehebohan ini pun membuat para emak-emak lainnya berkumpul untuk melihat, serta berjoget bersama.

"Musik mana musik, ayo ulangi," kata seorang ibu yang meminta ulang karena tak puas. **(dra)**

Tanam Pohon Ketapang di Baloi

► Rudi Minta CSR untuk Penghijauan

BATAM, TRIBUN - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengharapkan dukungan pengusaha dalam mewujudkan Batam Hijau. Hal ini disampaikan Rudi dalam kegiatan penanaman pohon Ketapang Kencana di Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Minggu (15/4).

"Batam Hijau sudah lama dicanangkan. Pelaksanaannya melalui tangan pengusaha," kata Rudi.

Penanaman pohon di jalan baru depan Kantor Lurah Taman Baloi ini dilaksanakan bersama Karang Taruna Kota Batam dan BPR Sejahtera Batam. Ketua Karang Taruna Batam, Zul Arif mengatakan pihaknya akan mengajak lebih banyak BPR untuk ikut serta menanam pohon di seluruh wilayah Kota Batam.

Sementara itu, Direktur BPR Sejahtera Batam, Sumantri mengatakan Ketapang Kencana yang ditanam



Batam Hijau sudah lama dicanangkan. Pelaksanaannya melalui tangan pengusaha

MUHAMMAD RUDI
Wali Kota Batam

saat itu ada 200 batang. Sebelumnya juga sudah ditanam 180 batang.

"Kalau boleh ditambah lagi. Saya minta lagi 300. Jadi ini akan dilapis. Nanti seluruh Batam kita hijaukan," kata Rudi.

Wali Kota mengatakan saat ini Pemerintah Kota Batam sedang melakukan pelebaran jalan. Dan dalam proses pelebaran jalan ini, tak bisa

dihindari untuk menebang pohon. Karena pohon di sepanjang jalan utama Batam sebagian besar berumur tua, butuh biaya besar jika harus dipindah tanam.

"Satu pohon biayanya bisa sampai Rp 50 juta. Makanya kita tanam lagi saja. Saya punya cita-cita, satu juta ketapang kencana di Batam," kata mantan anggota DPRD Kota Batam ini.

Rudi menargetkan pelebaran jalan utama Kota Batam bisa selesai dalam tujuh tahun. Dan untuk penghijauannya ia minta bantuan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).

"Nanti akan saya rapatkan dengan seluruh pengusaha. Biar CSR ada aturannya. Kita rapatkan, bagi habis wilayah Batam. Semua jalan yang dilebarkan, gersang, jadi dihiijaukan dengan penanaman pohon," ujarnya. (* / hat)



TANAM POHON- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menanam pohon Ketapang Kencana di Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Minggu (15/4). Ia mengharapkan dukungan pengusaha untuk mewujudkan Batam Hijau.

Sediakan 37.500 Ribu Buku

► Tiap Hari 100 Orang Kunjungi Perpustakaan

BATAM, TRIBUN - Dalam meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko Batam) menyediakan 37.500 ribu buku di perpustakaan daerah. Mulai dari buku pelajaran, umum, filsafat, agama, hukum, cocok tanam, dan lain sebagainya.

"Yang kita sediakan di perpustakaan jumlahnya 37.500 eksemplar," kata Kepala Dinas Perpustakaan, Aunar Karimsu beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan pengadaan buku tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam. Kemudian diserahkan ke bagian pelayanan.

"Untuk menambah koleksi buku Insha Allah ada setiap tahun. Tapi terbatas jumlah bukunya dan setiap tahun tidak sama untuk 2018 sendiri ada 1.000 buku yang tambah," ujarnya kepada *Tribun*.

Pantauan *Tribun*, perpustakaan memang tidak terlalu besar ukuran ruangnya. Hanya saja dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung pengunjung untuk membaca di tempat.

Dilengkapi dengan ruangan ber-AC, rak buku yang lengkap dan tersusun rapi berdasarkan jenisnya, katalog, bisa mencari buku

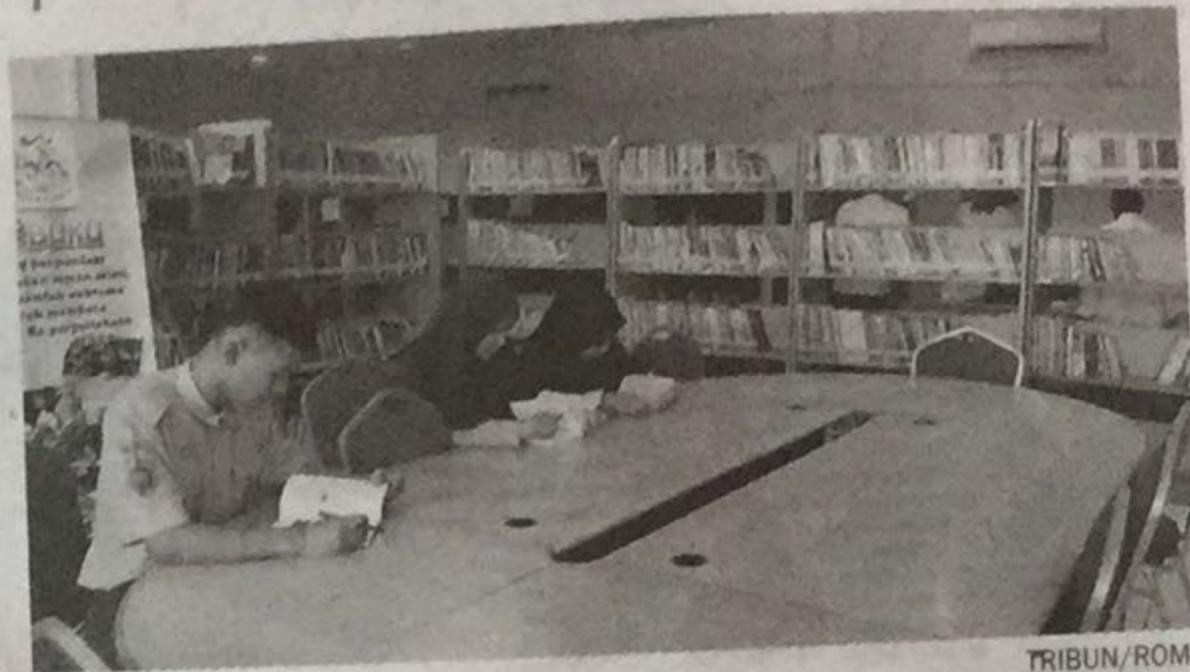
menggunakan komputer, ruang referensi, dan ruang baca anak maupun ruang baca umum.

"Perpustakaan Pemko layanannya sudah berstandar perpustakaan nasional. Meliputi layanan sirkulasi, layanan baca di tempat, dan terakhir layanan referensi," ujar Kabid Pelestarian dan Kepustakaan, Tajuddin.

Ia melanjutkan untuk layanan sirkulasi meliputi layanan informasi, kunjungan, peminjaman buku, pemulangan buku, dan lain sebagainya.

Kedua layanan baca di tempat. Artinya seluruh kalangan usia. Mulai dari anak-anak, remaja, umum bisa membaca di tempat. Ketiga layanan referensi, untuk kalangan mahasiswa yang di perguruan tinggi. Terutama untuk yang sedang menjalani penelitian, seperti skripsi dan tesis.

Dalam hal peminjaman buku, lanjut dia, cukup mengurus kartu perpustakaan. Tidak ada dipungut biaya atau gratis. Persyaratannya hanya membawa Pasfoto ukuran 3x4 atau 2x3, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat domisili dari RT/RW apabila KTP tersebut tak sesuai dengan tempat tinggal sekarang.



TRIBUN/ROMA

BACA BUKU- Pengunjung sedang menikmati membaca buku di Perpustakaan Daerah yang terletak di Gedung Bersama lantai IV Batam Center, beberapa waktu lalu. Kini setiap hari ada 100 pengunjung ke perpustakaan tersebut.

Tajuddin mengatakan jumlah kunjungan setiap harinya kurang lebih mencapai 100 orang. Bahkan Perpustakaan Pemko juga bekerjasama dengan berbagai instansi lain seperti Kemenag, Polresta, Dinas Pendidikan, seluruh sekolah, bahkan di MPP.

"Kami hanya pembina seluruh perpustakaan yang ada di Kota Batam seperti berbagai sekolah dan instansi lainnya. Kita memberikan pinjam pakai kepada mereka yang diadakan persemester," katanya.

Tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat Batam sekaligus menerapkan hobi membaca. Buku yang sifatnya merupakan prakarya.

"Rencananya juga kita sedang proses kerja sama dengan Lapas kelas II Barelang. Belum ada tanggal pastinya. Selain itu, ke depan kita akan buat proposal buat TBM (Taman Bacaan Masyarakat)," paparnya.

Salah satu pengunjung yang berprofesi advokat, Mukhlis mengatakan sudah dua kali berkunjung ke perpustakaan Pemko. Menurutnya ruangan baca sangat nyaman, bersih, dan pelayanannya bagus.

"Saya mengisi waktu luang ke sini. Perpustakannya lengkap, ber-AC, nyamanlah pokoknya," ujarnya sambil membaca buku psikologi pendidikan. (rus)

Urus Izin Lebih Efisiensi di MPP

► Pelayanan Satu Tempat Hemat Biaya

BATAM, TRIBUN - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk sangat apresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam dalam hal memberikan layanan perizinan.

Jadi mengatakan, sejak MPP beroperasi, semua bentuk perizinan jauh lebih baik. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para pengusaha.

"Saya kira ini sudah sangat baiklah, inilah yang dari dulu dibutuhkan masyarakat," kata Jadi, Minggu (15/4).

Dikatakannya, saat ini semua bentuk perizinan, baik itu perizinan lokal yang ada di Pemerintah

Kota (Pemko) Batam maupun di Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah ada di Mal Pelayanan Publik.

Bahkan kata Jadi, ada beberapa perizinan-perizinan dari kementerian yang dikuasakan kepada Pemko Batam dan BP Batam sudah bisa diurus di Mal Pelayanan Publik.

"Lebih dari itu, di MPP ada lembaga-lembaga pemerintah, lembaga vertikal dan horizontal, misalnya Imigrasi, kepolisian, BPJS, dan Kadin pun ada disana. Jadi kalau ingin mendaftarkan menjadi anggota Kadin ada di sana," ujar Jadi.

Jadi menuturkan, masyarakat para pengusaha sekarang ini dalam mengurus semua bentuk perizinan jauh lebih efisien, tidak mesti harus berpindah-

pindah lagi sejak ada Mal Pelayanan Publik.

"Misal harus urus ke Batam Center ke Sekupang lagi, kemudian ke Nagoya lagi, jadi ini bisa dilakukan di satu tempat dan di hari yang sama," terang Jadi.

Adapun Kadin sendiri menurut Jadi, menilai sejak ada MPP, manfaat yang dirasakan ialah efisiensi waktu dan biaya.

"Waktu orang tidak mesti harus ke mana-mana, dan begitu pun dengan biaya. Yang kemarin bisa harus menunggu satu minggu ini kan satu hari selesai. Apalagi sekarang semua sistem online, jadi masyarakat dari rumah bisa urus izin dan jauh lebih mudah, gampang, dan cepat," katanya. (egw)

Jangan Dimintai

“Di aturan itu jelas, pelaksanaan ujian akhir dan ujian praktik serta pemberian sertifikat tidak dipungut biaya. Walaupun faktanya bisa saja terjadi,” kata Udin, Sabtu (14/4).

Ia kembali menegaskan, semangat dari kedua aturan itu adalah agar siswa memiliki pengetahuan agama... pu dan cakap membaca Al-quran.

“Kalau ada pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan itu kan sudah sema-

ngatnya sudah beda. Sebaiknya jangan dimintai uang,” kata Udin.

Riky Indrakari yang juga anggota Komisi IV DPRD Ko-Batam menambahkan, semestinya sekolah bisa mengeluarkan sertifikat.

“Karena guru agama kan sudah berkompentensi mengeluarkan sertifikat. Namun persoalannya sekarang sertifikatnya tidak dikeluarkan oleh sekolah. Harusnya ini melekat pada tanggung jawabnya Dinas Pendidikan

Sambungan **Hal.1**

(Disdik) dalam artian sekolah tersebut,” kata Riki.

Lain persoalan, imbuah dia, jika sekolah itu tidak ada guru agamanya. Kecuali kalau memang tak ada guru agamanya.

“Ini harusnya pertanyakan ke Disdik. Kami hanya menyediakan regulasinya agar ada prosedurnya. Kemudian ada kepastian siapa saja yang mengeluarkan. Siapapun lembaga yang menyediakan harus ada MoU dengan Disdik,” ujarnya. **(wie/rus)**

Kami Tidak

tingkat belajar agama calon siswa,” katanya.

Sri juga mengungkapkan sertifikat tersebut baru diminta ketika calon siswa sudah dinyatakan diterima, bukan sebagai syarat mendaftar.

“Tahun yang lalu seperti itu, tapi tahun ini saya belum tahu pasti,” ucapnya.

Dia menegaskan pula, sertifikat tersebut tidak ditentukan tempat yang mengeluarkannya.

Yang terpenting ada lembaga yang mengeluarkan. Sekalipun itu sertifikat dari lembaga lain, privat atau masjid di luar sekolah, diperbolehkan.

“Itu diterima semua. Calon siswa tidak kami persulit. Yang penting ada sertifikat Hal yang sama untuk siswa baru yang beragama Nasrani,” katanya.

Sri menambahkan, SMPN 3 tidak mengeluarkan sertifikat. Namun apabila orang-

Sambungan **Hal.1**

tua siswa sepakat meminta tolong kepada guru agama agar dilaksanakan kegiatan untuk pengeluaran sertifikat, pihaknya akan membantu.

“Kalau wali atau orangtua siswa meminta guru agamanya untuk mengajari bisa saja dibantu. Tapi kebanyakan para siswa belajar di luar sekolah. Dari sanalah mereka mendapatkan sertifikat untuk digunakan nanti ke tingkat SMA,” katanya. **(als)**